

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Pembangunan ekonomi merupakan sebuah upaya untuk mengembangkan dan mengelola sumber daya yang tersedia di suatu daerah. Dengan adanya pembangunan daerah diharapkan nantinya akan membentuk hubungan dengan pihak swasta memunculkan lapangan pekerjaan baru dan menstimulasi perkembangan di daerah tersebut. Pembangunan ekonomi dilakukan secara sistematis, seimbang, dan berkelanjutan.

Secara filosofis, kegiatan pembangunan bisa dimaknai sebagai bentuk sistematis dan berkelanjutan untuk memunculkan suatu kondisi yang bisa dijadikan alternatif yang sesuai bagi terwujudnya aspirasi paling humanistik setiap warga negara. Dengan kata lain, suatu proses pembangunan merupakan suatu proses humanisasi manusia (Umami, 2014). Pembangunan ekonomi tidak hanya melihat pada kondisi ekonomi saja, namun juga melihat dari beberapa aspek yaitu kondisi politik, psikologi, sosial, dan budaya merupakan syarat yang juga penting dalam pembangunan ekonomi (Jhingan, 2016). Sehingga dapat dikatakan bahwa perkembangan pada suatu negara dikatakan baik tidak hanya melihat dari tingkat pertumbuhan ekonominya saja, namun melihat juga melihat dari aspek-aspek lainnya yang mendukung.

Sebuah daerah akan mengalami fase percepatan pertumbuhan jika beberapa sektor-sektor ekonominya memiliki potensi. Hal itu akan mendorong pembangunan (Ibrahim, 2018). Alasan ini penting untuk memutuskan potensi sektor-sektor

ekonomi di dalam suatu pembangunan daerah untuk mendistribusikan sumber daya yang tersedia secara memadai. Potensi pertumbuhan sektor-sektor ekonomi di suatu daerah dipercaya dapat memotivasi tumbuh dan berkembangnya sektor-sektor ekonomi lain di daerah tersebut. Maka dari itu dalam hal ini, potensi suatu daerah yang berkembang dari sektor ekonomi diharapkan mampu meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan sumber daya dari daerah sekitarnya. Lalu hal ini akan berlanjut dengan meningkatnya tingkat produktivitas baik ekspor produk barang maupun jasa di daerah tersebut. Dengan adanya analisis pertumbuhan ekonomi daerah ini diharapkan mampu menjabarkan bagaimana keterkaitan antara pertumbuhan daerah dengan ketimpangan yang ada di suatu daerah dengan daerah lainnya (Sjafrizal, 2014).

Pembangunan ekonomi daerah dilakukan sebagai upaya dari pemerintah daerah melalui kemitraan dengan pihak swasta dengan masyarakat di daerah tersebut untuk mengelola dan mengendalikan sumber daya yang ada di daerah dengan tujuan menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat setempat (Siwu, 2017). Dalam melaksanakan pembangunan ekonomi daerah diperlukan strategi yang baik, tepat dan terarah agar pembangunan yang dihasilkan dapat efektif dan efisien. Strategi yang baik, memadai dan terarah harus menyesuaikan dengan potensi, kondisi dan permasalahan masing-masing daerah serta menggunakan dengan bijak sumber daya yang ada untuk mendukung proses pembangunan ekonomi daerah. Tidak hanya strategi, tetapi juga kolaborasi antara pemerintah daerah dan pihak swasta dalam pengembangan potensi daerah untuk menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat lokal dengan tujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat setempat (Zakia, 2020).

Selain strategi dan kerja sama dalam pembangunan ekonomi daerah, prioritas tertentu harus ditetapkan agar pembangunan dapat maju secara khusus. Penetapan prioritas pembangunan harus dilakukan secara cermat agar perencanaan lebih terarah dan tepat, sehingga upaya untuk pencapaian tujuan pembangunan dapat dilakukan dengan efektif dan efisien (Sjafrizal, 2016). Sektor-sektor yang dianggap potensial di suatu daerah dapat dijadikan sebagai prioritas pembangunan untuk lebih mengembangkan sektor-sektor lain yang belum dianggap potensial di suatu daerah, sehingga pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan bersama dapat tercapai secara optimal. Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah hanya akan dicapai dengan sangat lambat jika pembangunan ekonomi tidak sejalan dengan prioritas dan potensi yang ada. Jika suatu daerah menerapkan kebijakan pembangunan dan dinyatakan berhasil, belum tentu kebijakan tersebut juga diterapkan di daerah lain. Karena perbedaan kondisi wilayah berimplikasi pada pola pembangunan yang diterapkan juga berbeda (Yulianita, 2010). Oleh karena itu, dalam melaksanakan pembangunan ekonomi daerah harus sesuai dengan prioritas pembangunan dan menyesuaikan dengan kondisi yang sedang terjadi di daerah tersebut.

Ada beberapa tujuan jangka panjang dari diadakannya pembangunan ekonomi daerah, salah satunya yaitu adanya pergantian struktur atau tatanan ekonomi daerah, hal terjadi melalui semakin majunya pembangunan daerah. Namun tidak semua sektor ekonomi mempunyai potensi pertumbuhan yang sama. Maka dari itu, para pembuat keputusan dalam perencanaan pembangunan daerah menggunakan sektor-sektor utama yang diyakini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi (Djadjuli, 2018).

Setiap upaya dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi di suatu daerah tentunya tidak lepas dari masalah disparitas antar daerah. Hal ini menunjukkan bahwa daerah dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak menjamin akan teratasinya suatu permasalahan yang terjadi di dalam daerah. Seperti halnya yang disebutkan oleh Kuncoro (2014) tentang keadaan suatu daerah, yaitu dalam pertumbuhan ekonomi merupakan prasyarat, namun itu tidak cukup dalam suatu proses pembangunan. Suatu pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak banyak berguna dalam menyelesaikan masalah kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan (Margareni, et al., 2016). Dalam menunjang suatu pertumbuhan ekonomi daerah seharusnya tidak hanya berfokus pada upaya peningkatan pendapatan daerah, tetapi juga pada mutu pertumbuhan ekonomi daerah. Kualitas atau mutu pertumbuhan ekonomi daerah erat kaitannya dengan semakin kecilnya disparitas antar daerah dengan ekonomi maju dan daerah dengan ekonomi tertinggal. Ketimpangan ini terjadi karena adanya perbedaan sumber daya dari masing-masing daerah satu dengan daerah lainnya (Hadju, et al., 2021). Maka dari itu, kebutuhan untuk mencapai tujuan pertumbuhan ekonomi yang bermutu dan berkualitas juga akan berbeda di tiap daerah.

Ketimpangan wilayah adalah salah satu permasalahan yang pasti timbul dalam pembangunan negara. Ketimpangan yang biasanya terjadi adalah ketimpangan ekonomi. Ketimpangan ekonomi secara wajar memang akan terjadi dalam proses pembangunan ekonomi, seiring dengan adanya perbedaan sumber daya alam dan infrastruktur yang dimiliki oleh masing-masing daerah (Iswanto, 2016). Ketimpangan merupakan salah satu isu penting dalam suatu proses pembangunan negara. Secara teoritis dan didukung oleh banyak penelitian empiris terbukti bahwa

pertumbuhan ekonomi yang tinggi berdampak pada ketimpangan pendapatan. Ketimpangan pendapatan berkaitan dengan tidak meratanya distribusi pendapatan. Semakin tinggi ketimpangan pendapatan menandakan bahwa semakin tinggi pula pendapatan masyarakat tidak merata. Kondisi ini pada akhirnya akan memperbesar kesenjangan antar masyarakat (Amri, 2017).

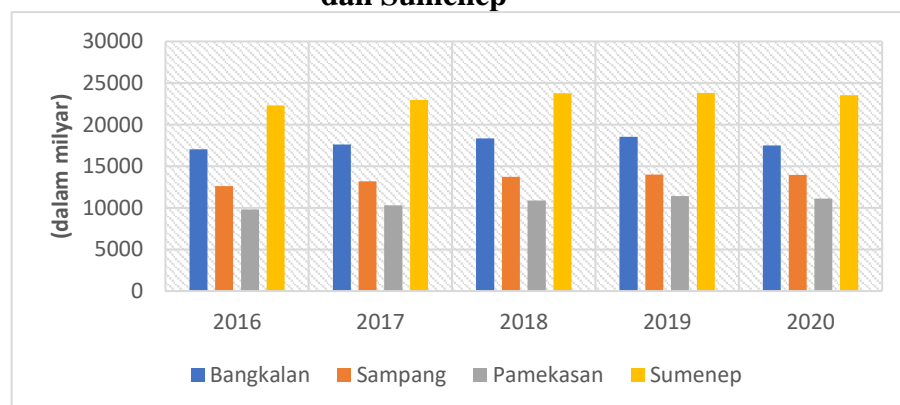
Pada tahun 2004, di Indonesia telah disahkan Undang-Undang Nomor 32 tentang Otonomi Daerah, yang mengatur tentang hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom, yang memuat aturan yang berkaitan dengan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri pemerintahan dan kepentingan masyarakat di daerah tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adanya peraturan tentang otonomi daerah diharapkan agar semua daerah dapat melaksanakan kebijakan yang diambil secara mandiri dan mengurangi ketergantungan terhadap pemerintahan pusat (Wiguna & Budhi, 2019). Melalui kebijakan otonomi daerah, pemerintah harus aktif dan kreatif dalam memajukan potensi-potensi yang terdapat di daerah dengan harapan menciptakan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu variabel makroekonomi yang dianggap paling penting. PDRB dapat dijadikan sebagai indikator atau tolak ukur untuk melihat seperti apa pertumbuhan sektor-sektor ekonomi di suatu wilayah. PDRB diperoleh dari pendapatan total setiap orang yang terlibat dalam kegiatan perekonomian, peningkatan tahunan produk dan jasa juga dikenal sebagai pertumbuhan ekonomi (Dewi & Yasa, 2018).

Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur tahun 2011-2031 yang disebutkan dalam Perda Provinsi Jawa Timur tahun 2011 membahas tentang keseimbangan pemerataan pembangunan antar wilayah dan pertumbuhan ekonomi. RPJMD Provinsi Jawa Timur tahun 2014-2019 memprioritaskan pengembangan kawasan tertinggal dalam rangka pemerataan wilayah yang diarahkan pada wilayah selatan Jawa Timur (Pacitan, Trenggalek, dan Ponorogo), Tapal Kuda (Bondowoso dan Jember), Madura (Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Sumenep).

Kota Surabaya merupakan kota besar yang menjadi pusat atau panutan dari kabupaten/kota yang ada di sekitarnya. Jembatan Suramadu merupakan akses jalur yang menghubungkan antara Surabaya dengan Madura. Jembatan Suramadu dibangun sebagai fasilitas publik dari pemerintah yang bertujuan untuk mempercepat pengembangan ekonomi wilayah khususnya Madura. Pengembangan wilayah cepat dan tepat akan meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi yang nantinya akan mengurangi tingkat kesenjangan antar wilayah. Dengan meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi dalam pengembangan sektor ekonomi yang masih merambat perlahan, diharapkan dapat mendorong pengembangan sektoral di pulau Madura (Suprijati & Yakin, 2017).

**Gambar 1.1. PDRB Kabupaten Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep**



Sumber: BPS Jawa Timur, 2020

Dari diagram di atas dapat dilihat bahwa Kabupaten Pamekasan merupakan daerah dengan tingkat PDRB terendah dibandingkan dengan tingkat PDRB kabupaten lainnya yang ada di Madura. Struktur perekonomian yang ada di Kabupaten Pamekasan masih didominasi oleh sektor pertanian, sektor perdagangan, hotel dan restoran, serta sektor jasa (Arliansyah, 2016). Dari tujuh belas sektor ekonomi yang ada, hanya empat yang merupakan sektor basis di Kabupaten Pamekasan. Sedangkan sektor lainnya masih cenderung belum berkembang dan relatif tertinggal. Hal ini akan bisa memicu timbulnya kesenjangan antar wilayah yang ada di pulau Madura. Maka dari itu perlu adanya pengembangan dari sektor-sektor yang ada sehingga tingkat pembangunan di Kabupaten Pamekasan bisa dilakukan secara optimal.

Dari kondisi yang terjadi ada beberapa permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini, yaitu perlunya analisis untuk mengidentifikasi sektor potensial dalam mendorong pembangunan ekonomi yang lebih besar dan meningkatkan potensial dalam pengembangan serta memanfaatkan sektor basis dan non basis yang dimiliki Madura khususnya di Kabupaten Pamekasan. Dalam upaya identifikasi sektor potensial perlu adanya dukungan infrastruktur yang sinkron sebagaimana mestinya dalam peningkatan PDRB untuk melihat sejauh mana kesejahteraan masyarakat dengan adanya pertumbuhan yang merambat tumbuh pesat dalam kurun waktu jangka panjang tanpa terjadinya ketimpangan sosial dengan sesama masyarakat dalam pulau maupun masyarakat luar pulau.

Dari latar belakang penelitian yang telah diuraikan di atas, Kabupaten Pamekasan merupakan daerah yang dianggap mempunyai potensi yang bisa dikembangkan, namun di sisi lain masih ada beberapa sektor yang dianggap masih

belum menguntungkan. Sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Sektor Unggulan untuk Pengembangan Ekonomi Daerah (Studi Kasus Kabupaten Pamekasan)”.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Sektor apa yang menjadi sektor basis di Kabupaten Pamekasan?
2. Bagaimana perubahan struktur sektor ekonomi yang terjadi di Kabupaten Pamekasan dalam *Shift Share (Share Regional, Proportional Shift, Differential Shift)*?
3. Bagaimana perbandingan pertumbuhan tiap sektor ekonomi yang ada di Kabupaten Pamekasan?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Menentukan sektor basis dan sektor non basis yang ada di Kabupaten Pamekasan.
2. Mengidentifikasi perubahan struktur sektor ekonomi yang ada di Kabupaten Pamekasan dengan *Shift Share (Share Regional, Proportional Shift, Differential Shift)*.
3. Mengidentifikasi perbandingan pertumbuhan tiap sektor ekonomi yang ada di Kabupaten Pamekasan.

## **1.4. Ruang Lingkup Penelitian**

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan data sekunder yang berupa data *time series* dengan lama periode pengamatan 2016-2020 (5



tahun). Data yang digunakan untuk melengkapi penelitian ini yaitu data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut lapangan usaha atas dasar harga konstan Provinsi Jawa Timur serta data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut lapangan usaha atas dasar harga konstan Kabupaten Pamekasan.

### **1.5. Manfaat Penelitian**

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan manfaat sebagai berikut:

1. Dengan adanya penelitian ini dapat diketahui sektor basis dan non basis, laju pertumbuhan ekonomi, dan dan perbandingan pertumbuhan tiap sektor ekonomi yang ada di Kabupaten Pamekasan.
2. Sebagai bahan informasi dan pertimbangan pemerintah Kabupaten Pamekasan terhadap masing-masing sektor yang ada.
3. Memudahkan pemerintah Kabupaten Pamekasan dalam membuat suatu perencanaan kebijakan dalam pembangunan ekonomi daerah berdasarkan potensi ekonomi yang dimiliki di daerah tersebut.